

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum Dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Baldrulzaman, Mariam Darus, 1983, *KUHPerdata-Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Djojodihardjo, M.A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M.Yahya, 2012, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardjo, M. Philipus, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Lamintang, Drs. P.A.F., 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Sembiring, M.U, 1997, *Teknik Pembuatan Akta, Program Pendidikan Spesialis Notariat*, Fakultas Hukum Sumatera Utara, Medan.
- Sjaifurrachman, dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Subekti, R, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan XXXII, PT. Intermedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) : (*Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Putusan Nomor 92/PDT.G/2016/PN.Smn *Junctis* Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT.YYK, Putusan Nomor 2592/K/PDT/2018/MA.

Peraturan Kode Etik

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

Laporan Penelitian

Pradnyana, Bgs, IGA Agastya, “Tanggung Jawab Notaris Atas Kebenaran Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasinya”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017.

Sari, Rialita Wike, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi surat Pernyataan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Di Bawah Tangan Secara Sepihak”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2020.

Teguh, Puspa Whenahyu, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan, Notaris Bimo Seno Sanjaya S.H. di Kota Yogyakarta,
Jalan Letjen Suprpto No. 88 Pringgokusuman, Gedong Tengen, Daerah
Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 12 Juli 2021.

Hasil wawancara dengan, Notaris Burhan Albar S.H., M.Kn. di Kulon Progo,
Jalan Kedundang, Dukuh II, Kecamatan Temon, Daerah Istimewa
Yogyakarta, pada tanggal 4 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan, Notaris Iin Suny Atmadja S.H., M.H., Di Bantul, Jalan
Gedongkuning selatan No. 198, Pringgolayan, Banguntapan, Daerah
Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 20 Agustus 2021.